

Skema *Public Private Partnership* pada *Sustainable Tourism* Untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan di Indonesia

**Muhammad Raihan Yulistio¹, Mira Aurelita²,
Marsha Aulia Dwimahendra³, Diani Sadiawati⁴**

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

³Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

⁴Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding email: raihanyulistio.ac@gmail.com

Abstrak : Indonesia berkomitmen mencapai target SDGs nomor 8 yang menekankan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan melalui *sustainable tourism* untuk mengoptimalkan potensi sektor pariwisata dengan melibatkan masyarakat lokal, perusahaan pariwisata, dan pemerintah dalam *Public Private Partnership* (PPP). Permasalahan yang penulis bahas mengenai peran *sustainable tourism* di Indonesia dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan skema *Public Private Partnership* (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) pada sektor *sustainable tourism*. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diberikan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan baru pada destinasi *sustainable tourism* bersumber dari kemunculan UMKM masyarakat lokal serta kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur *sustainable tourism*; serta skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha menciptakan kemitraan tidak hanya mencakup pemerintah dan badan usaha, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti sponsor, lembaga keuangan, kontraktor, dan masyarakat. Saran yang penulis berikan berupa pemerintah

harus gencar dalam melakukan pengadaan infrastruktur *sustainable tourism*; badan usaha swasta juga harus gencar dalam memberikan penawaran kerjasama infrastruktur *sustainable tourism*; pengelola usaha pariwisata dapat mentransformasikan usahanya menjadi *sustainable tourism*; serta masyarakat lokal dapat mengambil peran membuat usaha mikro kecil menengah di sekitar destinasi *sustainable tourism*.

Kata Kunci: *Pariwisata Berkelanjutan, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha, Pembangunan Berkelanjutan.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengalami berbagai permasalahan dan hambatan di berbagai aspek, seperti sosial, budaya, ekonomi, budaya dan pendidikan. Dalam menangani permasalahan tersebut, Indonesia membutuhkan strategi-strategi yang berdampak positif dan nyata, salah satunya dengan melalui pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dideklarasikan di Kantor Pusat PBB New York. Dibentuknya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai penyempurnaan dari Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs).³⁵¹ *Millennium Development Goals* (MDGs) dinilai kurang bersifat merata walaupun tidak sedikit negara-negara yang mengalami kemajuan dengan adanya program tersebut dan gagal dalam mendapatkan titik rasional dari perspektif dari negara-negara di dunia, sehingga dalam pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) masih adanya disparitas karena secara global dianggap berhasil, tetapi tidak merata pelaksanaannya ke dalam seluruh lapisan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) dan ikut menyesuaikan diri dengan adanya penyempurnaan *Millennium Development Goals* (MDGs) menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs).³⁵² Konsep

351 Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murninigtas. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press. hlm. 3.

352 Adityo Darmawan Sudagung, Veronica Putri, Joy Evan, Ivan Sasiva, Laras Putri Olifiani. (2019). *Upaya Indonesia Mencapai Target Sustainable Development Goals Bidang Pendidikan di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau*

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 poin yang harus dicapai dengan prinsip “*No One Left Behind*” menjadikan agenda pembangunan nasional menjadi lebih aktif dan melibatkan berbagai pihak, sehingga bukan hanya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaannya melainkan seluruh masyarakat Indonesia yang akan menjadikan pelaksanaan SDGs lebih inklusif dan partisipatif. Sinergi antara sektor pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pihak lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai setiap tujuan SDGs. Dengan demikian, Indonesia mengambil peran proaktif dalam menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan, tidak hanya untuk generasi saat ini tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara.

Keikutsertaan Indonesia dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) disebabkan karena banyak kesamaan program-program tersebut dengan tujuan Indonesia. Salah satunya adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 8, yaitu Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Tentunya, program tersebut di Indonesia adalah hal yang sangat krusial karena banyaknya permasalahan perekonomian dari masa ke masa, sehingga memunculkan permasalahan seperti kesenjangan perekonomian dan minimnya lapangan kerja yang mengakibatkan laju perekonomian Indonesia menjadi terhambat dengan pertumbuhannya di bawah 6%.³⁵³ Hal ini, membuat pemerintah Indonesia berupaya untuk selalu meningkatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya, RPJMN) yang sesuai pada substansi RPJMN 2015-2019, perlu dilaksanakan tindakan untuk memastikan kestabilan sistem keuangan dalam negeri, mengembangkan jaringan keuangan, dan mengalokasikan fokus pada sektor keuangan agar mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditentukan.³⁵⁴

Disamping RPJMN, demi mencapai distribusi yang merata dalam pembangunan, pemerintah juga merancang Rencana Pembangunan

Kalimantan Barat (2014-2019). *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 5(1), 1-27. hlm. 5.

353 Nur Alim Mubin AM. (2021). SDG's Dalam Pembangunan Ekonomi Pasca Pandemi, *Jurnal Indonesia Sains*, 2 (08), 1330-1343. hlm. 1331.

354 Lola Agnes Putri Alam, dkk. (2023). Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019 Dimensi Pembangunan Ekonomi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*. 2 (02), 1-11. hlm. 2.

Jangka Menengah Daerah (selanjutnya, RPJMD). RPJMD berperan sebagai instrumen utama dalam menanggapi tantangan pembangunan ekonomi Indonesia sesuai dengan komitmen terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Keterlibatan Indonesia dalam SDGs, khususnya fokus pada tujuan nomor 8 terkait dengan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, mencerminkan pemahaman akan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Terlihat bahwa isu-isu perekonomian, seperti disparitas ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan, menjadi perhatian sentral. Dengan merujuk pada RPJMN sebagai pedoman, pemerintah Indonesia bersiap untuk mengatasi masalah ini dengan langkah-langkah konkret. Melalui RPJMD, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih terukur dan sesuai dengan kekhasan serta kebutuhan masyarakat setempat, memungkinkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.³⁵⁵ Dengan demikian, RPJMD menjadi sarana yang efektif dalam merealisasikan visi pembangunan ekonomi yang sejalan dengan SDGs di tingkat nasional dan daerah.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai sektor yang berkontribusi dalam menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB), seperti pariwisata. Sejalan dengan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 8, pariwisata mampu meningkatkan standar hidup dan menyediakan lapangan pekerjaan.³⁵⁶ Dalam hal ini, pemerintah menerapkan *Public Private Partnership* (PPP) dalam sektor pariwisata agar memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan bagi pertumbuhan dan pengembangan industri pariwisata, serta bertujuan untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya masing-masing sektor untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. *Public Private Partnership* (PPP) merupakan kemitraan atau kerjasama antara sektor publik dan swasta untuk membangun, mengelola dan mendukung pengembangan infrastruktur.³⁵⁷ Selain itu, sumber

355 Ahmad Fajar Rahmatullah, dkk. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi 2013-2018 Sudahkah Memasukan Pentingnya Konsep Smart City, *Jurnal MODERAT*, 6 (1), 125-134. hlm. 125.

356 Helmi Aliansyah dan Wawan Hermawan. (2019). Peran Sektor Pariwisata pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Bina Ekonomi*, 23 (1), 39-55. hlm. 40.

357 Muh. Hidayar Djabbari, dkk, (2021). Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara, *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 7 (1), 1-13. hlm. 2.

pendanaan untuk investasi infrastruktur bisa didapatkan melalui *Public Private Partnership* (PPP) karena adanya keterbatasan anggaran pemerintah.³⁵⁸ Keterbatasan anggaran pemerintah dapat berdampak pada terhambatnya terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, padahal pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dalam hal penyerapan tenaga kerja.³⁵⁹ Adanya penyerapan tersebut dapat menekan dan mengurangi angka pengangguran di lingkungan wisata, sehingga dapat dilihat bahwa pariwisata mempunyai fungsi sebagai katalisator pembangunan dan berperan sebagai *agent of development* dalam pembangunan.³⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa sektor pariwisata memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mewujudkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) agar terciptanya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan *Public Private Partnership* (PPP) dianggap sebagai solusi dalam mencapai program tersebut. Tentunya, kondisi pembangunan pariwisata atau *sustainable tourism* akan lebih optimal jika adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan pihak swasta karena merupakan kerjasama berjangka panjang, sehingga perlu diketahui lebih lanjut mengenai kondisi tersebut di Indonesia dan skema *sustainable tourism* dengan *Public Private Partnership* (PPP) untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat mewujudkan program dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).³⁶¹

Dari latar belakang yang telah dituliskan, maka penulis tertarik mengangkat dua permasalahan yang penulis akan bahas yakni mengenai peran *sustainable tourism* di Indonesia dalam menciptakan

358 *Ibid.*

359 Direktorat Jenderal Anggaran. (n.d.). Efektivitas Alokasi Anggaran Kementerian Pariwisata terhadap Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara. Kementerian Keuangan.

<https://anggaran.kemenuke.go.id/in/post/efektivitas-alokasi-anggaran-kementerian-pariwisata-terhadap-kunjungan-wisatawan-mancanegara-dan-wisatawan-nusantara>, Diakses pada 20 Oktober 2023

360 Nik Haryanti. (2020). Implementasi Public Private Partnership sebagai Usaha Keberhasilan Pengembangan Pariwisata di Era Global. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7 (1), 30-49. hlm. 26.

361 Bhayu Rhama dan Ferry Setiawan. (2020). Assessing Public Private Partnership in Indonesia Tourism. *Policy & Governance Review*. 4 (3), 197-209. hlm. 199.

lapangan pekerjaan dan skema Public Private Partnership (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) pada sektor *sustainable tourism*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, serta pendekatan konseptual.³⁶² Pendekatan perundang-undangan dalam penulisan ini digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan pengaturan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha terhadap pembangunan infrastruktur *sustainable tourism*. Pendekatan komparatif dalam penulisan ini digunakan untuk perbandingan dengan negara Malaysia dan negara Singapura mengenai jumlah wisatawan asing atas pengaruh sektor pariwisata. Pendekatan konseptual pada penelitian ini akan memberikan rekomendasi mengenai skema *Public Private Partnership* terhadap pembangunan infrastruktur *sustainable tourism* yang bertujuan untuk memenuhi tujuan ke 8 *Sustainable Development Goals*. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengkaji berbagai buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya, sehingga didapatkan informasi relevan terhadap *sustainable tourism* dan kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta memperluas pemahaman tentang konteks permasalahan yang diteliti. Dalam mengolah data-data yang diperoleh penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sustainable Tourism di Indonesia dalam Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Sektor ekonomi menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan suatu bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya program *Sustainable Development Goals* atau pembangunan berkelanjutan yang ditujukan secara global telah menghimpun dimensi pembangunan berkelanjutan, yang terdiri atas lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Sebuah bangsa yang layak selalu bergantung pada tingginya pertumbuhan ekonomi dan

362 Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. hlm. 4.

cukupnya peluang lapangan pekerjaan.³⁶³ Hal ini telah menunjukkan betapa pentingnya kondisi ekonomi suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat suatu negara.

Selama empat dekade terakhir, Indonesia telah mengimplementasikan rencana strategis pembangunan pariwisata sebagai bagian integral dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan dampak positif pada sektor terkait. *Sustainable tourism* atau lebih dikenal pariwisata berkelanjutan, menjadi salah satu sektor ekonomi yang dapat berperan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang secara positif akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2014, tercatat target Kementerian Pariwisata dan Ekonomi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 10 juta. Sementara, permintaan pariwisata global telah memunculkan peluang-peluang baru yang tumbuh pesat dalam menjadikan pariwisata sebagai sektor strategis dalam rencana pembangunan nasional.³⁶⁴

Pentingnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan menjadi sorotan utama bagi pemerintah dan masyarakat, tercermin pada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 yang telah dicabut oleh Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (selanjutnya disebut sebagai Permenparekraf Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan). Pedoman ini mencerminkan komitmen untuk mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap aspek pariwisata, memastikan keberlanjutan jangka panjang. Menurut pedoman ini, pariwisata berkelanjutan melibatkan empat kriteria utama: pengelolaan destinasi, pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan. Prinsip perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi yang efektif dalam manajemen destinasi juga diatur secara rinci. Pedoman ini memberikan landasan yang kokoh bagi industri pariwisata untuk mengedepankan keberlanjutan, dengan penekanan pada kolaborasi antara pemerintah, perusahaan pariwisata, dan

363 Arief Setijawan.(2018). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi. *Jurnal Planoeath*, 3 (1), 7-11. hlm. 8.

364 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan ILO. (2012). Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia. hlm. 1.

masyarakat demi menciptakan masa depan pariwisata Indonesia yang positif dan berkelanjutan.³⁶⁵

Jika dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan Christie dan Crompton dalam penelitian sektor pariwisata di Afrika bahwa pariwisata dapat menjadi alat pembangunan yang ampuh, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, mendiversifikasi perekonomian, memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan juga menciptakan keterkaitan ke belakang dan ke depan dengan sektor produksi dan jasa lainnya.³⁶⁶ *Sustainable tourism* tentu dapat menumbuhkan perekonomian serta dapat memberikan lapangan pekerjaan baru tanpa mengesampingkan *cleanliness, health, safety, and environment sustainability* (CHSE) seperti yang tercantum pada Permenparekraf Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Dengan adanya lapangan pekerjaan baru maka angka kemiskinan dapat berkurang.

Sebagai penyumbang yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi Indonesia, pariwisata lebih dari hanya menjadi penyumbang pendapatan devisa. Apabila pariwisata dikelola secara berkelanjutan, maka dapat menjadi alat yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, diantaranya melalui penciptaan lapangan kerja di wilayah perkotaan dan pedesaan, mengarahkan perkembangan ke wilayah pedesaan yang mungkin lebih miskin dan terpinggirkan, meningkatkan infrastruktur transportasi dan komunikasi, serta menciptakan pekerjaan yang ramah lingkungan sambil memberikan pelatihan keterampilan kepada generasi muda yang sebelumnya tidak memiliki akses.³⁶⁷

Sustainable tourism bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh pariwisata terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Hal ini mencakup penggunaan sumber daya yang bijaksana untuk mencegah konsumsi yang berlebihan, mendukung pelestarian alam, menghormati tradisi dan warisan lokal, dan berpartisipasi dalam pelestarian. *Sustainable tourism* juga

365 Ida Ayu Putu Widiati dan Indah Permatasari. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 16 (1), 35-44. hlm. 38.

366 Christie, I.T & D.E. Crompton. (2003). Republic of Madagascar : Tourism Sector Study Africa Region. Working Paper Series No. 63.

367 *Ibid.*

bertujuan untuk memastikan bahwa pariwisata jangka panjang akan menjadi lebih berkelanjutan melalui pendidikan dan perubahan perilaku. Upaya ini tidak hanya membangun hubungan yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan satu sama lain, sehingga mendukung masyarakat lokal untuk memperoleh keuntungan finansial dan sosial.³⁶⁸ Namun, keterlibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata dapat membuka peluang untuk menciptakan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai, seperti program yang menggabungkan unsur kegiatan wisata dengan muatan pendidikan didalamnya.³⁶⁹ Salah satu contohnya adalah program wisata pelajar, yang mana usaha peningkatan pada akses pendidikan masyarakat ini diberikan tidak hanya terbatas pada pembelajaran formal, tetapi juga melibatkan aspek keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan pemahaman tentang manfaat pariwisata yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal maupun luar.

Dalam hal ini, program wisata pelajar tidak hanya menjadi penggerak ekonomi masyarakat, namun juga membuka wawasan mengenai wisata itu sendiri, ataupun seni dan budaya lokal. Hal ini pun pada akhirnya akan membantu pelestarian budaya serta menghargai nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia.³⁷⁰ Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan dengan baik, tidak hanya berdampak pada sektor lapangan pekerjaan, tetapi juga sejalan dengan pencapaian pendidikan sesuai goal 4 SDGs. Sehingga, hal ini dapat memperluas kesempatan wisatawan untuk belajar dan memperkaya pengetahuan, baik itu melalui pelatihan ataupun pengembangan keterampilan.

Sustainable tourism, dengan segala potensinya, berhasil menciptakan peluang kerja yang tersebar luas di sektor-sektor kunci seperti perhotelan, transportasi, dan layanan pariwisata. Keyakinan Menteri Pariwisata dan Ekonomi, Sandiaga Uno, terkait penciptaan tiga juta pekerjaan di sektor pariwisata berkelanjutan melalui KTT G20

368 Linda Kusumaning Wedari. (2022, Agustus 03). Pengenalan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism). Binus. dikutip dari <https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2022/08/03/pengenalan-pariwisata-berkelanjutan-sustainable-tourism/> diakses pada 26 Oktober 2023.

369 Erwin Akib. (2020). Pariwisata Dalam Tinjauan Pendidikan: Studi Menuju Era Revolusi Industri, *Journal of Tourism. Hospitality, Travel, and Business Event*. 2 (1), 1-7. hlm. 4.

370 *Ibid*., hlm. 5.

Bali menjadi tonggak positif.³⁷¹ Langkah ini tidak hanya memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka peluang pekerjaan yang sangat dibutuhkan untuk memperkaya pasar kerja Indonesia. Dengan demikian, tidak hanya menjadi pemacu potensial pariwisata, tetapi juga menjadi kunci pembangunan ekonomi inklusif di negara.

Salah satu contohnya adalah ekowisata yang merupakan sektor berkembang dan dapat menciptakan peluang kerja, seperti pada program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Program ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dengan fokus yang tidak hanya pada atraksi wisata, tetapi juga pada pelestarian lingkungan, warisan budaya, dan dukungan terhadap komunitas lokal melalui penciptaan lapangan kerja. Pada 2022 lalu, Menparekraf menetapkan dan mengapresiasi 50 desa wisata terbaik yang menjadi simbol Indonesia bangkit, yang didasarkan pada aspek penilaian berupa daya tarik pengunjung, *homestay*, digital dan kreatif, souvenir, toilet umum, penerapan *cleanliness, health, safety, and environment sustainability* (CHSE), serta kelembagaan desa.³⁷² ADWI 2022 menjadi bukti konkret bahwa pariwisata berkelanjutan tidak hanya menciptakan peluang kerja di daerah pedesaan, tetapi juga membimbing pertumbuhan ke wilayah-wilayah yang lebih terpinggirkan. Dengan demikian, program semacam ini tidak hanya berperan dalam menciptakan pekerjaan, tetapi juga dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Lebih jauh lagi, dapat memberikan dukungan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), membuka jalan bagi pertumbuhan, sehingga dapat menciptakan peluang kerja di berbagai sektor, termasuk perhotelan, transportasi, dan layanan pariwisata.

Contoh lain dapat dilihat dari dua desa di Sleman, yaitu Desa Pentingsari dan Desa Umbulharjo, yang mendapat perhatian

371 Ni Made L. Putri. (2022, November 16). Sandiaga Optimis 3 Juta Lapangan Kerja Pariwisata Tercipta Usai G20 Bali. Detik Bali. dikutip dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6409966/sandiaga-optimis-3-juta-lapangan-kerja-pariwisata-tercipta-usai-g20-bali> diakses pada 26 Oktober 2023.

372 Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, 31 Oktober). Menparekraf: 50 Desa Wisata Terbaik Simbol Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. dikutip dari <https://setkab.go.id/menparekraf-50-desa-wisata-terbaik-simbol-kebangkitan-ekonomi-indonesia/> diakses pada 27 Oktober 2023.

khusus sebagai contoh konsep *sustainable tourism*. Desa Pentingsari terkenal secara internasional dan bahkan masuk dalam 100 besar destinasi berkelanjutan versi *Global Green Destinations Days* (GGDD), khususnya untuk kategori pelestarian lingkungan. Begitu pula Desa Umbulharjo, keduanya membuktikan keberhasilannya dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan secara konsisten berfokus pada pelestarian lingkungan. Kedua desa ini merupakan contoh nyata dari konsep *sustainable tourism* yang berhasil. Selain memberdayakan ekonomi lokal dan UMKM, kedua desa tersebut juga berhasil lolos dalam penerapan aspek kebersihan kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, terbukti dengan perolehan sertifikasi CHSE. Hal ini menjadi bukti yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.³⁷³

Sementara itu, adanya peningkatan jumlah pergerakan wisatawan lokal dan kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia menjadi suatu pencapaian. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara semester I-2023 mencapai 433,57 juta perjalanan, atau naik 12,57% dari 2022. Sedangkan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara per Januari-Juli 2023 mencapai 6,31 juta kunjungan, atau naik 196,85% dibandingkan 2022. Lalu, pada bulan September 2023, Indonesia mencatat sebanyak 1,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), menunjukkan penurunan sebesar 5,51 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.³⁷⁴ Sementara, pada triwulan III-2023, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 192,52 juta perjalanan, mencatatkan kenaikan sebesar 13,36 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.³⁷⁵

373 B. Dian Saraswati. (2023, Agustus 25). Desa Terindah di Sleman Menjadi Percontohan hingga Dunia Internasional. Jogja Politan. Dikutip dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/08/25/512/1146401/desa-terindah-di-sleman-menjadi-percontohan-hingga-dunia-internasional> diakses pada 27 Oktober 2023.

374 Kemenparekraf RI. (2023, Oktober 9). Expert Survey: Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tumbuh pada 2024. Dikutip dari <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/expert-survey-sektor-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-tumbuh-pada-2024> diakses pada 27 Oktober 2023.

375 Badan Pusat Statistik. (2023, November 1) Kunjungan wisatawan

Apabila dibandingkan dengan Singapura, memang jumlah wisatawan yang datang lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Namun, berdasarkan data terbaru, jumlah kunjungan wisatawan ke Singapura pada bulan September 2023 tercatat sebanyak 828.315 orang, hal ini lebih rendah dibandingkan Indonesia yang mendapat kunjungan wisatawan sebesar 1,070,245 pada bulan September 2023.³⁷⁶ Sedangkan dibandingkan dengan Malaysia, jumlah wisatawan di Indonesia sangat jauh perbedaannya. Kunjungan wisatawan Malaysia dilaporkan sebesar 1,678,913 per Juni 2023, dan keseluruhan wisatawan hingga bulan Agustus 2023, Malaysia mencatat pencapaian signifikan dengan jumlah kunjungan wisatawan 10,8 juta orang.³⁷⁷ Angka ini memperlihatkan bahwa kuatnya daya tarik Malaysia sebagai destinasi pariwisata yang diminati. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, walaupun memiliki perbedaan yang lebih rendah, Indonesia mempertahankan daya tariknya dengan jumlah kunjungan yang cukup mengesankan. Secara keseluruhan, pertumbuhan yang signifikan dalam pergerakan wisatawan lokal dan kunjungan mancanegara di Indonesia memperlihatkan dinamika positif pada sektor pariwisata dan berpotensi untuk terus mengalami pertumbuhan yang lebih baik.

Melibatkan 84 pakar dan pemimpin dari dunia akademis, pemerintah, dan industri, salah satu survei yang diselenggarakan untuk menyusun “Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023/2024” mengindikasikan optimisme terkait pemulihan sektor pariwisata di Indonesia. Sebanyak 76,19% responden menyatakan keyakinan bahwa sektor pariwisata saat ini sedang pulih, dan 35,71% di antaranya optimis bahwa pada tahun 2024, sektor ini akan mencapai tingkat sebelum pandemi. Proyeksi survei juga mencatat perkiraan 7-9 juta kunjungan wisatawan asing pada tahun 2023. Hasil ini mencerminkan harapan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun

mancanegara pada September 2023 tumbuh 52,76 persen bila dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. Dikutip dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/11/01/2047/kunjungan-wisatawan-mancanegara-pada-september-2023-tumbuh-52-76-persen-bila-dibandingkan-bulan-yang-sama-pada-tahun-lalu.html> diakses pada 28 Oktober 2023.

376 CEIC. (n.d.). *Singapore Visitor Arrivals*. Dikutip dari <https://ceicdata.com/en/indicator/singapore/visitor-arrivals> diakses pada 28 Oktober 2023.

377 CEIC. (n.d.). *Malaysia Visitor Arrivals*. Dikutip dari <https://ceicdata.com/en/indicator/malaysia/visitor-arrivals> diakses pada 28 Oktober 2023.

2024, yang didukung oleh upaya pemerintah dalam mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif untuk menciptakan peluang kerja.³⁷⁸

Pentingnya *sustainable tourism* terletak pada keberlanjutan jangka panjang industri pariwisata secara global. Dengan mengambil langkah-langkah seperti melibatkan masyarakat lokal, melestarikan lingkungan, dan menghormati budaya, maka dapat menciptakan masa depan pariwisata yang positif. Semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan pariwisata, dan para wisatawan, memiliki peran dalam menjaga pariwisata tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat baik bagi lingkungan maupun masyarakat setempat. *Sustainable tourism* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan lapangan kerja, tetapi juga melindungi lingkungan dan budaya lokal. Konsep ini menjadi krusial karena pertumbuhan pariwisata, jika tidak diatur dengan baik, dapat menyebabkan dampak negatif seperti penyalahgunaan sumber daya, kerusakan lingkungan, dan hilangnya nilai budaya.³⁷⁹ Oleh karena itu, semua pihak perlu bekerja sama untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan mengkaji solusi lebih lanjut mengenai skema yang cocok pada sektor ini guna meningkatkan lapangan pekerjaan.

2. Skema *Public Private Partnership* pada Sektor *Sustainable Tourism* Sebagai Solusi dalam Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Seerti yang tercantum dalam lampiran Permenparekraf Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa ekosistem pariwisata membutuhkan keterlibatan antara Pemerintah, Sektor Publik, dan Swasta, maka pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam membangun infrastruktur *sustainable tourism*, Salah satu kerjasama yang melibatkan pemangku kepentingan lain yakni skema KPBU. Pembangunan Infrastruktur Pariwisata juga dimungkinkan

378 Kemenparekraf RI. (2023, Oktober 9). Expert Survey: Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tumbuh pada 2024. Dikutip dari <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/expert-survey-sektor-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-tumbuh-pada-2024> diakses pada 27 Oktober 2023.

379 Linda Kusumaning Wedari. (2022, Agustus 03). Pengenalan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism). Binus. Dikutip dari <https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2022/08/03/pengenalan-pariwisata-berkelanjutan-sustainable-tourism/> diakses pada 5 November 2023.

untuk dikerjasamakan secara KPBU dikarenakan secara eksplisit disebutkan pada Pasal 5 Ayat (2) Perpres KPBU bahwa Infrastruktur Pariwisata termasuk sebagai infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan. Kehadiran KPBU sebagai opsi pendanaan serta pembangunan bagi sektor pariwisata sejatinya dapat mendukung implementasi *Sustainable Development Goals* tujuan ke 8 yakni *Decent Work and Economic Growth*. Implementasi poin 8.9 yakni menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang memberikan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal dapat diimplementasikan dengan adanya skema KPBU.³⁸⁰

Proyek KPBU atau biasa disebut *Public Private Partnership Project* pada dunia internasional adalah proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan oleh Pemerintah melalui kerjasama dengan Badan Usaha. Skema KPBU dilaksanakan lewat suatu perjanjian yang memiliki daya ikat (kontrak) kerjasama yang melibatkan Pemerintah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Badan Usaha.³⁸¹ Hal ini seperti yang tercantum pada Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (selanjutnya disebut sebagai Perpres KPBU) bahwa “perjanjian KPBU ditandatangani oleh PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana.” Saat akhir periode kerjasama, infrastruktur yang dilakukan kerja sama selanjutnya dialih serahkan kepada PJPK.

Pada industri pariwisata, pemerintah dengan badan usaha saling bekerjasama untuk mempromosikan tujuan wisata dan kesejahteraan wisatawan untuk mencapai tujuan wisata.³⁸² Adanya skema KPBU dalam *sustainable tourism* untuk mensejahterakan wisatawan baik lokal maupun mancanegara dengan memerhatikan

380 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.). *Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi - SDGs Bappenas*. Dikutip dari <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>. Diakses pada 14 Nov. 2023.

381 Maman Suhendra. (2017). Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 41-46.

382 Kanwal Shaheen, *et al.* (2019). Dynamic linkages between tourism, energy, environment, and economic growth: evidence from top 10 tourism-induced countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(30), 31273-31283. doi:10.1007/s11356-019-06252-1

unsur keberlanjutan. Adanya peran pemerintah melalui PJKP sesuai dengan teori *welfare state* oleh Kranenburg, yang mana negara bukan hanya ditugaskan memelihara ketertiban hukum, tetapi juga berperan aktif dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya.³⁸³ Negara berperan dalam mengelola perekonomian yang padanya terdapat tanggung jawab negara untuk menjamin tersedianya pelayanan kesejahteraan. Keberadaan pemerintah juga didasarkan pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yakni “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang mana negara ikut berperan dalam mengelola kekayaan alam dan budaya di Indonesia menjadi destinasi *sustainable tourism* yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Landasan dari perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut berupa pembagian alokasi risiko antara Pemerintah (lewat PJKP) dan Badan Usaha. Risiko-risiko yang ada dialokasikan kepada pihak yang memiliki kemampuan lebih dalam mengendalikan, mengelola, mencegah, maupun menyerapnya. PJKP dalam hal ini dapat berupa instansi/institusi yang mewakili Pemerintah dalam penyediaan proyek KPBU. Institusi pemerintah yang dimaksud jika kita berpatokan pada Pasal 2 ayat (1) Perpres KPBU adalah Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Selain itu, BUMN dan BUMD dapat menjadi PJKP sesuai dengan Pasal 8 Perpres KPBU.³⁸⁴ Kemudian, klasifikasi Badan Usaha Pelaksana dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. Selain Pemerintah melalui PJKP dan Badan Usaha Pelaksana, terdapat juga pihak lain dalam proyek KPBU *sustainable tourism*. Pihak-pihak yang juga terlibat yakni sponsor, kontraktor, pengguna (masyarakat publik), dan lembaga keuangan/bank.³⁸⁵

Dalam membangun infrastruktur *sustainable tourism* sebagai salah satu pemenuhan dari poin 8.9 SDGs, maka pelaksanaannya

383 Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Press. Hlm. 14.

384 Muhammad Jibril, dkk. (2021). Kedudukan Pemerintah dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(11).

385 Eka Setiajatnika, dkk. (2023). Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ). *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(2), 328.

harus di *back-up* dengan poin 17 dari SDGs yakni *Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development*. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan selain pemerintah dalam proyek KPBU *sustainable tourism* sejalan dengan *Ministrial Declaration of the High Level Political Forum of 2016 ECOSOC* bahwa dalam mengimplementasikan agenda pembangunan berkelanjutan yang mana merupakan rencana berisi tindakan untuk manusia, planet, dan kemakmuran yang juga berupaya memperkuat perdamaian universal secara lebih luar, untuk diterapkan oleh semua negara dan pemangku kepentingan, bertindak dalam kemitraan kolaboratif. Dalam deklarasi ini mengandung pernyataan yang memberikan arahan resmi bahwa dalam merealisasikan SDGs tidak melibatkan Pemerintah saja, tetapi melibatkan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dengan terintegrasi.³⁸⁶ Implementasi poin 8.9 dalam mempromosikan *sustainable tourism* harus melibatkan berbagai pihak.

Pengetahuan, sumber daya manusia, dan modal yang dimiliki pemerintah tidaklah cukup dalam mencapai target seluruh SDGs pada tahun 2030. Harus terdapat alokasi serta pembagian tugas sesuai dengan spesialisasi masing-masing pemangku kepentingan. Terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan lain yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Contohnya jika dibandingkan dengan pihak swasta, maka pihak swasta memiliki mobilitas yang lebih baik dibandingkan pihak Pemerintah; pihak swasta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan mampu membangun kemitraan yang seimbang sehingga lebih baik dalam mengelola struktur risiko imbal balik (*risk-return structure*); Pemerintah juga kurang mampu menggalang pendanaan yang masif untuk proyek infrastruktur berskala besar.³⁸⁷

Meskipun demikian, Pemerintah juga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan infrastruktur *sustainable tourism*. Seperti peran Pemerintah pada skema KPBU dalam memberikan fasilitas-fasilitas tambahan bagi badan usaha pelaksana. Fasilitas-fasilitas tersebut

386 Alisjahbana, Armida Salsiah, & Murminingtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia : konsep, target dan strategi implementasi (2nd ed.)*. Bandung: Unpad Press. Hlm. 287

387 Eka Setiajatnika, *Op Cit.* 322.

berupa Dukungan Pemerintah; Dukungan Kelayakan; Jaminan Pemerintah; Pembayaran Ketersediaan Layanan; dana pembebasan lahan; serta Imbalan Keberhasilan.³⁸⁸ Fasilitas yang diberikan guna menarik minat pengusaha serta mempermudah dalam terbangunnya proyek *sustainable tourism*.

Dukungan pemerintah dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal tersebut berupa insentif perpajakan sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Perpres KPBU yakni Menteri yang menjalankan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk Dukungan Kelayakan dan/atau insentif perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan PJPk.

Pemerintah kemudian juga berperan dalam memberikan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU. Jaminan tersebut tercantum pada Pasal 17 ayat (2) Perpres KPBU berupa Penjaminan Infrastruktur yang mana merupakan kewajiban finansial PJPk yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. Bagi badan usaha pelaksana yang akan membangun infrastruktur *sustainable tourism* melalui skema KPBU akan mendapatkan penjaminan infrastruktur PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.³⁸⁹

Dukungan pemerintah selanjutnya berupa Pembayaran Ketersediaan Layanan dapat dilihat pada Pasal 11 ayat 2. Adapun maksud dari Pembayaran Ketersediaan Layanan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 16 yakni pembayaran secara berkala oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah untuk Badan Usaha Pelaksana dikarenakan keberadaan layanan Infrastruktur yang memenuhi kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran Ketersediaan Layanan bukanlah merupakan hutang, melainkan kewajiban mengikat yang memerlukan komitmen alokasi pendanaan.³⁹⁰ Pembayaran Ketersediaan Layanan dapat mulai dibayarkan setelah infrastruktur telah dibangun sehingga

388 Y. Sogar Simamora, dkk. (2018). *Aspek Kontraktual dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha*. Malang: Intelegensia. Hlm. 11.

389 Andi Syafirah Putri Abdi Patu dan Muhammad Heru Akhmadi. (2021). Evaluasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kereta Api Makassar-Parepare. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(2), 221-235.

390 Arief Darmawan. Mempromosikan Skema KPBU dengan Mekanisme Availability Payment sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Sarana-Prasarana (Infrastruktur) Publik di Daerah. *OMNICOM: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1-10.

memasuki tahap operasi.³⁹¹ Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagai pembayaran dari manfaat *sustainable tourism* yang nanti akan diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya, peran yang dilakukan oleh badan usaha yakni pendanaan, desain, konstruksi, operasi, hingga pemeliharaan infrastruktur.³⁹² Efisiensi swasta dalam perannya tersebut dioptimalkan dengan tujuan peningkatan sektor pelayanan umum terhadap masyarakat (*public sector*).³⁹³ Pihak swasta dalam menjalankan perannya pada skema KPBU dalam meningkatkan *public sector* tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan berkelanjutan dan bukan sekedar mengejar keuntungan saja. Badan usaha pelaksana dalam melakukan pembangunan dan operasi (*build and operate*) infrastruktur *sustainable tourism* harus berpedoman pada spesifikasi yang telah dirumuskan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/ kepala daerah/ badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah.³⁹⁴ Spesifikasi mengenai *sustainable tourism* yang diatur oleh menteri dengan memperhatikan SDGs tercantum pada Pasal 2 ayat 1 Permenparekrif Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yakni Pengelolaan Berkelanjutan; Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi; Keberlanjutan Budaya; serta Keberlanjutan Lingkungan.

Dalam memenuhi spesifikasi pengelolaan berkelanjutan, maka infrastruktur *sustainable tourism* yang telah menjadi destinasi memiliki syarat mempunyai satu organisasi, departemen, kelompok, atau komisi yang memiliki tanggung jawab terhadap pendekatan terkoordinasi terhadap pariwisata berkelanjutan. Destinasi *sustainable tourism* juga harus membuat dan menerapkan satu strategi dan rencana aksi pengelolaan infrastruktur untuk beberapa tahun kedepan. Destinasi *sustainable tourism* juga membuat suatu sistem yang memonitor dan menanggapi isu dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata.

391 Patu and Akhmadi, *Op Cit.* 230.

392 Esther Cheung, et. al. (2009). Reasons for implementing public private partnership projects perspectives from Hong Kong, Australian and British practitioners. *Journal of Property Investment and Finance*, 27(1). pp. 81-95

393 Eko Nur Surahman, dkk. (2020). *Dinamika Penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hlm. 7

394 *Ibid.*, hlm. 13

Berikutnya terdapat keberlanjutan sosial yang disertakan dengan ekonomi. Keberlanjutan sosial dalam hal ini kemampuan masyarakat lokal dalam menyerap masukan dan untuk dapat menerima wisatawan sehingga tempat destinasi berfungsi dengan baik tanpa adanya ketidakharmonisan sosial.³⁹⁵ Keberlanjutan ekonomi pariwisata turut ikut dipengaruhi oleh tenaga kerja yang memenuhi syarat dalam memberikan layanan serta mengoperasikan fasilitas.³⁹⁶ Dalam memenuhi spesifikasi keberlanjutan sosial dan ekonomi, maka destinasi memonitor ekonomi pariwisata meliputi tingkat jumlah pengunjung; pengeluaran pengunjung; lapangan kerja; serta bukti distribusi manfaat ekonomi. Destinasi juga harus dapat menyokong dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan serta mendukung ekonomi setempat yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur juga harus menghargai hak-hak masyarakat asli serta tidak melakukan pemindahan tempat tinggal tanpa persetujuan. Fasilitas yang ada dalam infrastruktur harus terbuka untuk semua, termasuk orang yang berkebatasan fisik dan yang berkebutuhan khusus. Infrastruktur yang dibangun juga harus terdapat layanan kesehatan dan keamanan, serta memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan.

Keberlanjutan budaya berkaitan dengan menghormati keotentikan sosial-budaya.³⁹⁷ Dalam memenuhi spesifikasi keberlanjutan budaya, maka destinasi mengevaluasi, merehabilitasi, serta mengkonservasi aset budaya. Destinasi *sustainable tourism* dapat memonitor, melindungi dan bila perlu merehabilitasi atau merestorasi akses masyarakat setempat ke situs-situs alam dan budaya. Destinasi juga perlu memerhatikan serta melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di dalamnya. Destinasi juga harus melakukan monitoring dan mensosialisasikan agar pengunjung tidak merusak situs budaya.

Keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan kebutuhan wisatawan dalam berpariwisata tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama pada wilayah yang rentan.³⁹⁸ Dalam memenuhi spesifikasi keberlanjutan lingkungan, maka destinasi melakukan

395 Yohanes Sulistyadi, Fauziah Eddyono, dan Derinta Entas. (2021). *Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. Hlm. 33

396 *Ibid.* hlm. 145

397 *Ibid.* hlm. 7

398 *Ibid.* hlm. 7

monitor, mengukur, dan menanggapi dampak pariwisata terhadap lingkungan alami, mengkonservasi ekosistem, habitat, dan spesies, dan mencegah masuk spesies asing invasif. Destinasi juga harus memiliki penjaga yang tersertifikasi yang dapat melindungi lingkungan serta kehidupan liar dari adanya penangkapan yang tidak bertanggung jawab. Destinasi harus mengurangi konsumsi energi serta meningkatkan efisiensi pemakaian energi.

Adapun untuk pihak sponsor dapat menempatkan bagian tertentu dengan memberikan pendanaan proyek berbentuk ekuitas. Lembaga keuangan dapat memberikan pembiayaan kepada proyek KPBU dalam bentuk pinjaman. Selanjutnya ada publik (wisatawan) sebagai pengguna layanan pariwisata.³⁹⁹ Publik sebagai pengguna layanan membayar tarif biaya layanan yang akan ditetapkan oleh PJPB bersama dengan Badan Usaha Pelaksana. Publik juga harus memperhatikan peraturan yang harus dipatuhi dalam berwisata pada tempat *sustainable tourism*. Adapun bagi wisatawan yang melanggar dapat dikenakan sanksi yang tegas.

D. Kesimpulan

Keterlibatan masyarakat lokal dalam *Public Private Partnership* pada destinasi *sustainable tourism* memberikan lapangan pekerjaan baru dengan munculnya Usaha Mikro Kecil Menengah di wilayah *sustainable tourism*. Penciptaan lapangan pekerjaan juga muncul dikarenakan kebutuhan sumber daya manusia dalam mengelola destinasi *sustainable tourism*. Program-program seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan tidak hanya menciptakan peluang kerja, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Meskipun pertumbuhan pariwisata menunjukkan tren positif, penting untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang melalui implementasi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, memastikan manfaat ekonomi, dan melindungi lingkungan serta warisan budaya.

Dalam upaya membangun infrastruktur pariwisata berkelanjutan, kerjasama antara pemerintah, sektor publik, dan swasta melalui skema KPBU menjadi krusial. Skema ini menciptakan kemitraan yang melibatkan pemerintah sebagai Penanggung Jawab

399 Setiajatnika, *Loc. cit.* 328.

Proyek Kerjasama (PJPK) dan badan usaha, dengan pembagian risiko yang sesuai. Proyek KPBU tidak hanya mencakup pemerintah dan badan usaha, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti sponsor, lembaga keuangan, kontraktor, dan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan. Alokasi sumber daya dan tanggung jawab yang sesuai dari setiap pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan hingga mencapai target SDGs tahun 2030.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan:

1. Pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Daerah, BUMN, serta BUMD sebagai PJPK harus gencar dalam melakukan pengadaan Infrastruktur *sustainable tourism* untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja;
2. Badan usaha swasta sebagai badan usaha pelaksana harus gencar dalam memberikan penawaran kerjasama Infrastruktur *sustainable tourism* kepada pemerintah dikarenakan prospek yang diberikan kemudahan oleh pemerintah serta sesuai dengan SDGs;
3. Pengelola usaha pariwisata baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Badan usaha swasta dapat mentransformasikan usahanya menjadi *sustainable tourism* sesuai Permenparekraf Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan asing;
4. Masyarakat yang daerahnya akan dibangun Infrastruktur *sustainable tourism* harus mengambil momentum membuat usaha mikro kecil menengah dengan memperhatikan aspek lingkungan sehingga mengurangi angka pengangguran.

E. Daftar Pustaka

Buku

Alisjahbana, A. S., & Murninigtas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*. Jawa Barat: Unpad Press.

- HR, Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Press
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Simamora, Y. Sogar, dkk. (2018). *Aspek Kontraktual dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha*. Malang: Intelegensia.
- Sulistiyadi, Yohanes, Fauziah Eddyono, dan Derinta Entas. (2021). *Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Surahman, Eko Nur, dkk. (2020). *Dinamika Penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan ILO. (2012). *Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia*. Jakarta: International Labour Organisation Office Jakarta.

Artikel Jurnal

- Akib, E. (2020). Pariwisata Dalam Tinjauan Pendidikan: Studi Menuju Era Revolusi Industri. *Journal of Tourism, Hospitality, Travel, and Business Event*, 2(1), 1-8.
- Alam, L. A. P., & dkk. (2023). Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019 Dimensi Pembangunan Ekonomi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 2(2), 2.
- Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2019). Peran Sektor Pariwisata pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Bina Ekonomi*, 23(1), 40.
- Cheung, E., Chan, A. P., & Kajewski, S. L. (2009). Reasons for implementing public private partnership projects perspectives from Hong Kong, Australian and British practitioners. *Journal of Property Investment and Finance*, 27(1). pp. 81-95
- Christie, I. T. (2003, November). Republic of Madagascar: Tourism Sector Study. *Africa Region Working Paper Series*, (63).
- Djabbari, M. H., & dkk. (2021). Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 7(1), 2.
- Darmawan, A. (2018). Mempromosikan Skema KPBU dengan Mekanisme Availability Payment sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Sarana-Prasarana (Infrastruktur) Publik di Daerah. *OMNICOM: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1-10.

- Haryanti, N. (2020). Implementasi Public Private Partnership sebagai Usaha Keberhasilan Pengembangan Pariwisata di Era Global. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(1), 26.
- Jibril, M., Hudaya, H. S., & Pradana, G. H. (2021). Kedudukan Pemerintah dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(11).
- Mubin, N. A. (2021). SDG's Dalam Pembangunan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Indonesia Sains*, 2(8), 1331.
- Patu, A. S. P. A., & Akhmadi, M. H. (2021). Evaluasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kereta Api Makassar-Parepare. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(2), 221-235.
- Rahmatullah, A. F., & dkk. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi 2013-2018 Sudahkah Memasukan Pentingnya Konsep Smart City. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 125.
- Rhama, B., & Setiawan, F. (n.d.). Assessing Public Private Partnership in Indonesia Tourism. *Policy & Governance Review*, 4(3), 1999.
- Setiajatnika, E., Gunadi, T., & Nugraha, H. (2023). Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ). *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(2), 317-332.
- Setijawan, A. (2018, Februari). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi. *Jurnal Planoeearth*, 3(1), 7-11.
- Shaheen, K., Zaman, K., Batool, R., Khurshid, M. A., Aamir, A., Shoukry, A. M., ... Gani, S. (2019). Dynamic linkages between tourism, energy, environment, and economic growth: evidence from top 10 tourism-induced countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(30), 31273-31283. doi:10.1007/s11356-019-06252-1
- Sudagung, A. D., Putri, V., Evan, J., Sasiva, I., & Olifiani, L. P. (2019). Upaya Indonesia Mencapai Target Sustainable Development Goals Bidang Pendidikan di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat (2014-2019). *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 5(1), 5.
- Suhendra, M. (2017). Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 41-46.

Widiati, I. A. P., & Permatasari, I. (2022, Februari). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 16(1), 35-44.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Internet

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi - SDGs Bappenas*. Retrieved November 14, 2023, from <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>

Direktorat Jenderal Anggaran. (2016). *Efektivitas Alokasi Anggaran Kementerian Pariwisata terhadap Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara*. Kementerian Keuangan. Retrieved Oktober 20, 2023, from <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/efektivitas-alokasi-anggaran-kementerian-pariwisata-terhadap-kunjungan-wisatawan-mancanegara-dan-wisatawan-nusantara>

Expert Survey: Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tumbuh pada 2024. (2023, October 9). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Retrieved Oktober 27, 2023, from <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/expert-survey-sektor-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-tumbuh-pada-2024>

Kunjungan wisatawan mancanegara pada September 2023 tumbuh 52,76 persen bila dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. (2023, November 1). Badan Pusat Statistik. Retrieved Oktober 28, 2023, from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/11/01/2047/kunjungan-wisatawan-mancanegara-pada-september-2023-tumbuh-52-76-persen-bila-dibandingkan-bulan-yang-sama-pada-tahun-lalu.html>

Malaysia Visitor Arrivals [Chart-Data-Forecast], 1989 - 2023. (n.d.). CEIC. Retrieved Oktober 28, 2023, from <https://ceicdata.com/en/indicator/malaysia/visitor-arrivals>

- Putri, N. M. L. (2022, November 16). *Sandiaga Optimis 3 Juta Lapangan Kerja Pariwisata Tercipta Usai G20 Bali*. detikcom. Retrieved Oktober 26, 2023, from <https://www.detik.com/bali/berita/d-6409966/sandiaga-optimis-3-juta-lapangan-kerja-pariwisata-tercipta-usai-g20-bali>
- Saraswati, B. D. (2023, August 25). *Desa Terindah di Sleman Menjadi Percontohan hingga Dunia Internasional*. Jogjapolitan. Retrieved Oktober 27, 2023, from <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/08/25/512/1146401/desa-terindah-di-sleman-menjadi-percontohan-hingga-dunia-internasional>
- Sekretariat Kabinet. *ADWI 2022, Menparekraf: 50 Desa Wisata Terbaik Simbol Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. (2022, October 31). Sekretariat Kabinet. Retrieved Oktober 27, 2023, from <https://setkab.go.id/menparekraf-50-desa-wisata-terbaik-simbol-kebangkitan-ekonomi-indonesia>
- Singapore Visitor Arrivals [Chart-Data-Forecast], 2014 - 2023*. (n.d.). CEIC. Retrieved Oktober 28, 2023, from <https://ceicdata.com/en/indicator/singapore/visitor-arrivals>
- Wedari, L. K. (2022, August 3). *Pengenalan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)*. Binus University. Retrieved Oktober 26, 2023, from <https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2022/08/03/pengenalan-pariwisata-berkelanjutan-sustainable-tourism/>